



ARAH, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN TAHUN 2015 - 2019

Oleh:

Kepala Badan PPSDM Kesehatan



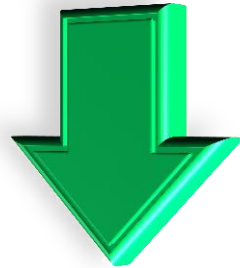
Jakarta, 22 April 2015

Goals Pemerintah (Nawa Cita)



1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membuat pemerintah tidak absen (hadir) dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Pembangunan Kesehatan



Bagian Pembangunan Manusia untuk
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
(Nawa Cita)

7 Sasaran

1. Peningkatan status kesehatan dan gizi Ibu dan Anak
2. Penurunan prevalensi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
4. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan , terutama untuk daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan
5. Peningkatan kepesertaan dan berkembangnya Sistem Jaminan Sosial Kesehatan
6. Terpenuhinya kebutuhan akan tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit
7. Peningkatan responsivitas (pemenuhan harapan masyarakat) dari sistem kesehatan

Mendukung
Universal
Health
Coverage



**RPJMN Kesehatan
(2015-2019)**

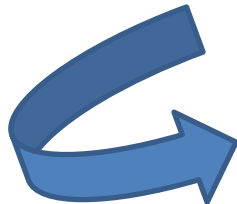
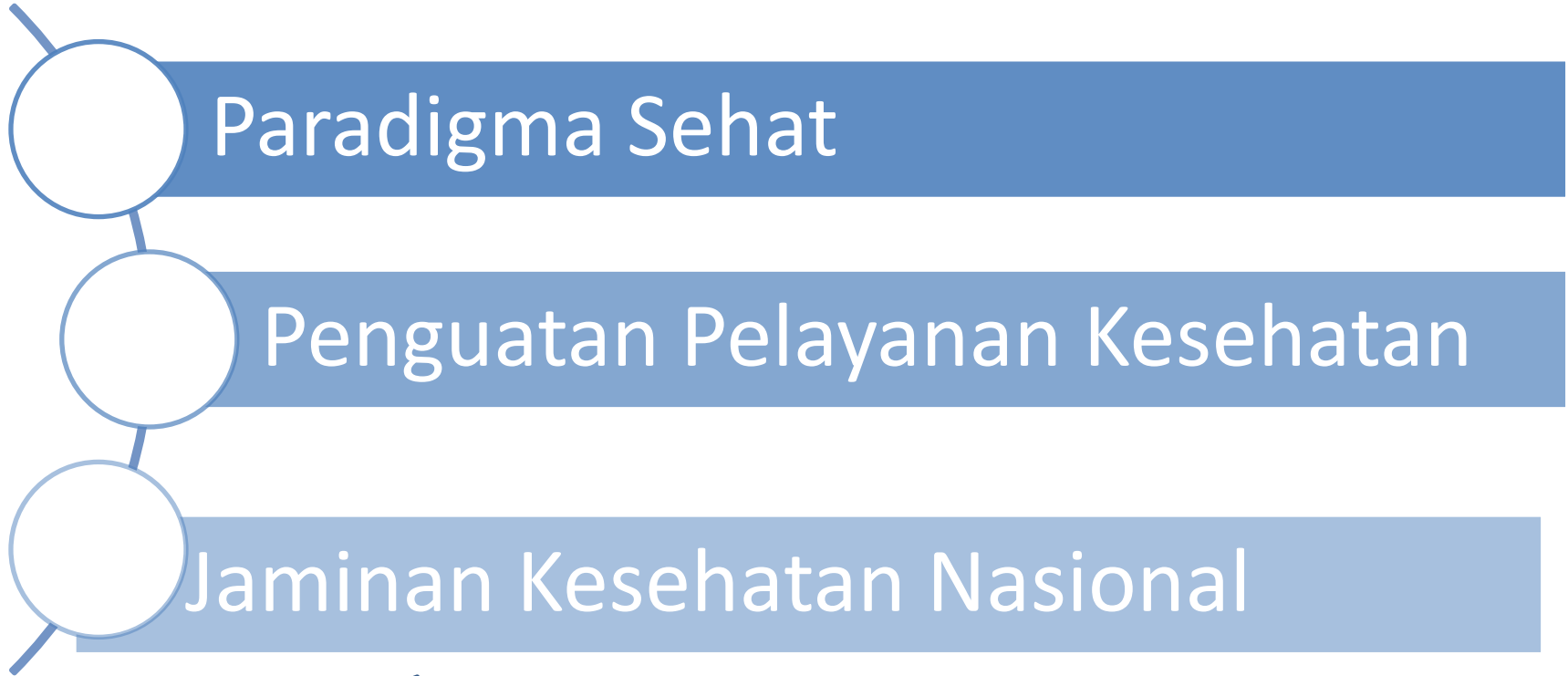


**VISI:
Masyarakat Sehat,
Mandiri, dan Berkeadilan**

Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja dan lansia
2. Meningkatkan akses terhadap pelayanan gizi masyarakat
3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
4. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi, alat kesehatan
5. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan
6. Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
7. Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional
- 8. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan kualitas sumber daya manusia kesehatan**
9. Memperkuat pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas
10. Memperkuat pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas
11. Memperkuat manajemen dan sistem informasi kesehatan
12. Meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan

POIN PENTING PROGRAM INDONESIA SEHAT



Pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis resiko (health risk).

PERAN SDM DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Manajemen Kesehatan

WHO :
Tujuan PK, 80 %
Ditentukan oleh SDM

SDM K

Farmasi, Alkes dan Makanan

Litbang

Pemberdayaan Masyarakat

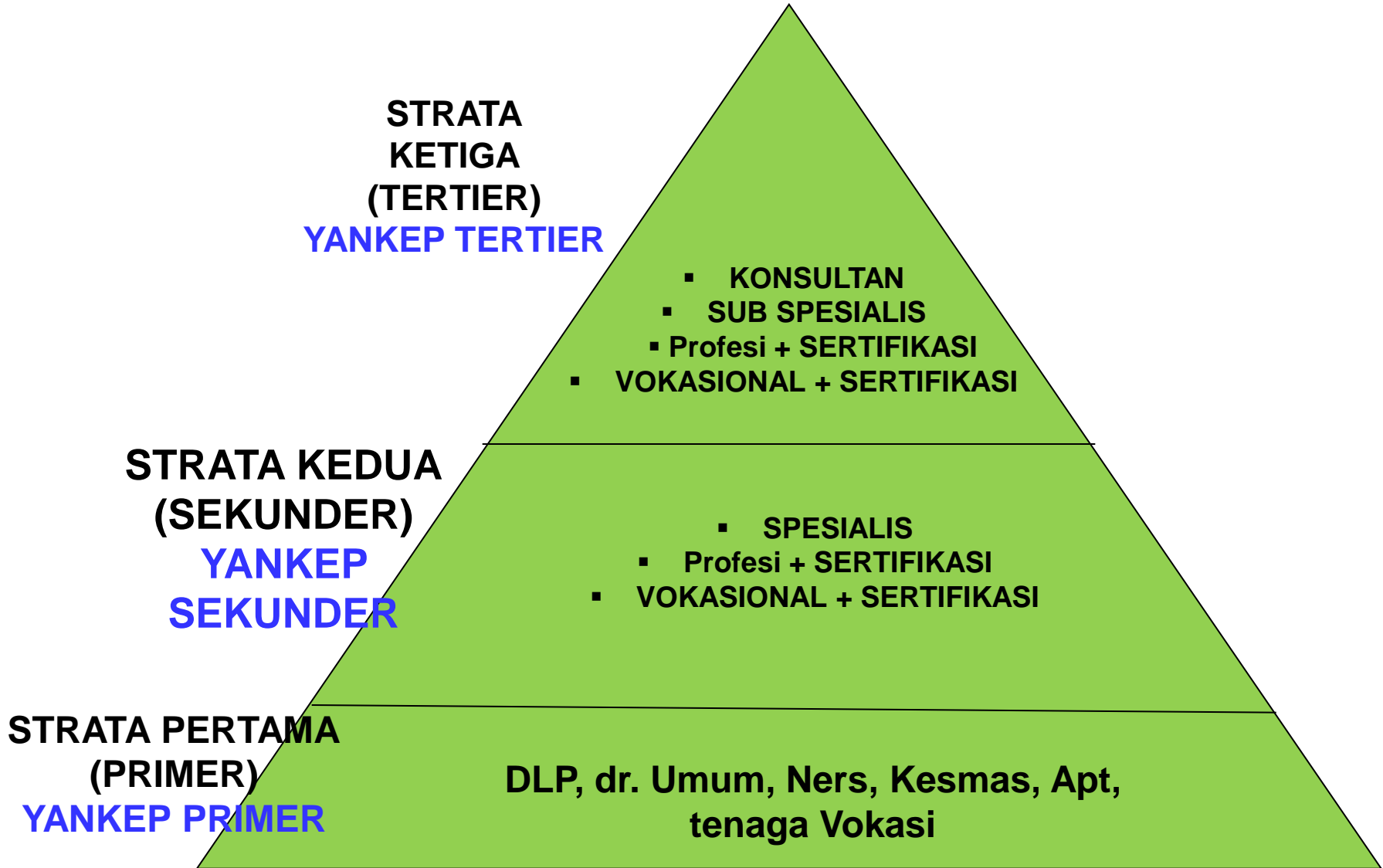
Upaya Kesehatan

- Derajat Kesehatan
- Perlindungan finansial
- *Responsiveness* yankes

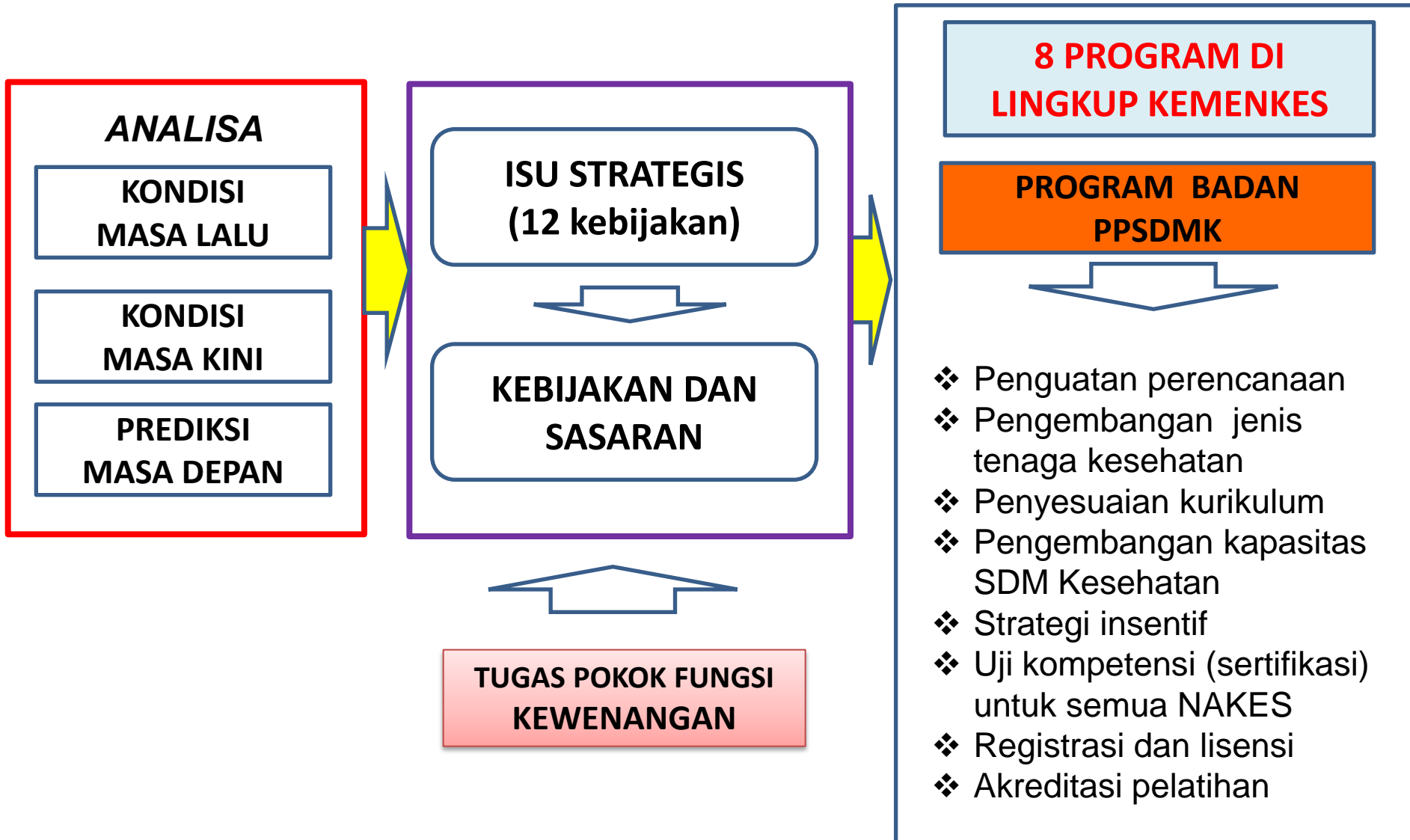
Pembiayaan Kesehatan (termasuk JKN)

- PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
- PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
- PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
- PENGAWASAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

KUALIFIKASI KEBUTUHAN SDM SESUAI KEBUTUHAN TINGKAT PELAYANAN KESEHATAN



KONSEP PENDEKATAN



STRATEGI

1. Peningkatan distribusi tenaga yang terintegrasi, mengikat dan lokal spesifik
2. Pengembangan insentif baik material dan non material untuk nakes dan SDMK
- 3. Peningkatan produksi SDM Kesehatan yang bermutu**
4. Penerapan mekanisme registrasi dan lisensi tenaga dengan uji kompetensi pada seluruh nakes
5. Peningkatan mutu pelatihan melalui akreditasi pelatihan
- 6. Pengendalian peserta pendidikan dan hasil pendidikan**
- 7. Peningkatan pendidikan dan pelatihan jarak jauh**
8. Peningkatan pelatihan yang berbasis kompetensi dan persyaratan jabatan
9. Pengembangan sistem kinerja

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN

PENGATURAN PENDIDIKAN SMK KESEHATAN

- 1) Pembahasan Permenkes Asisten tenaga Kesehatan:
 - a) Definisi, tugas dan peran
 - b) Pemberian tugas kepada Asisten Tenaga Kesehatan
 - c) Tempat kerja dll
- 2) Pembahasan kurikulum SMK Kesehatan oleh Kemendikbud.
Perlu masukan dari dosen Poltekes, Pendidikan lanjut dll

UPAYA PENINGKATAN AKREDITASI & KUALITAS POLTEKES

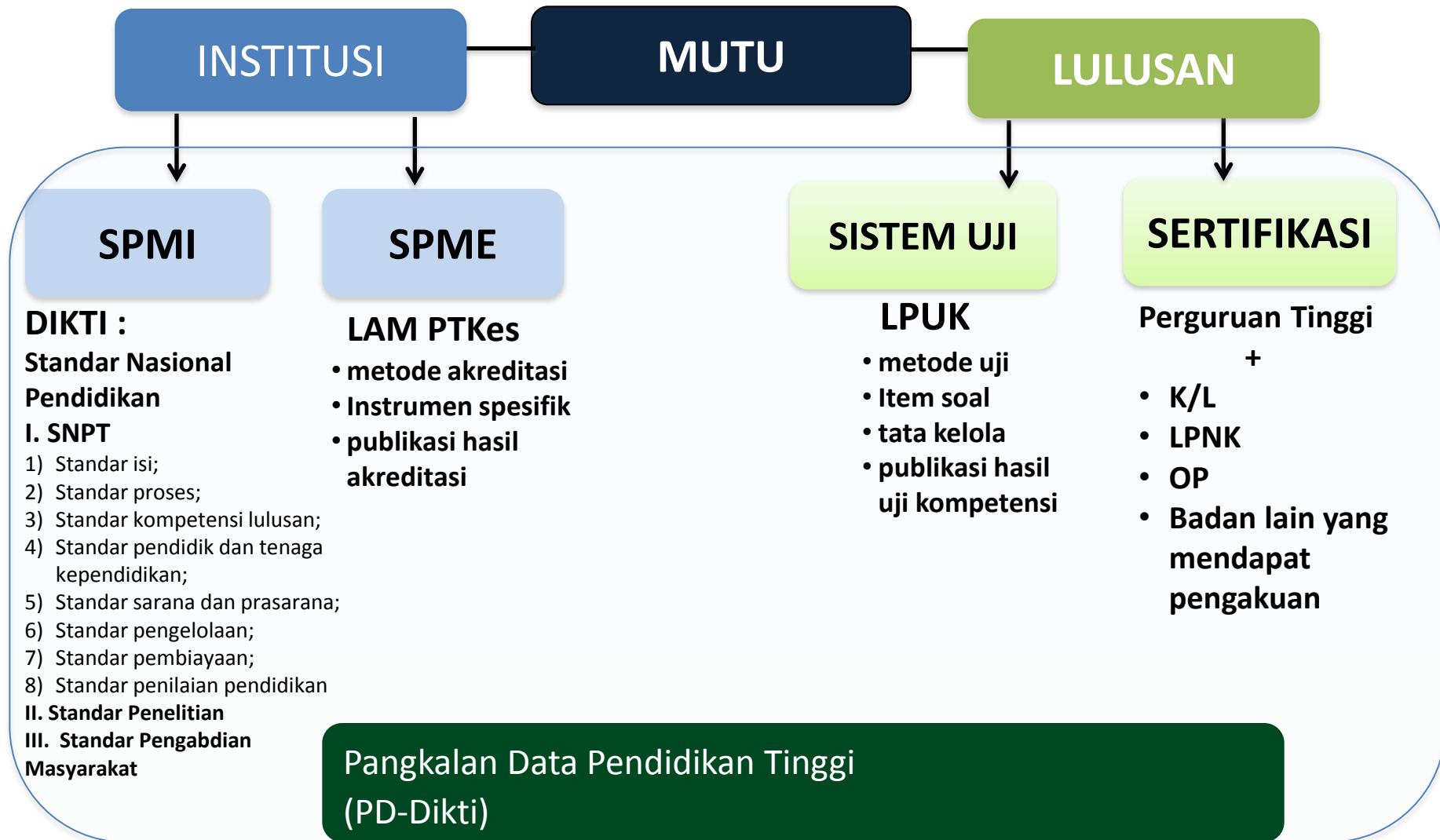
- 1) Pendampingan akreditasi Poltekes :
- 2) Pembentukan unit pendidikan kesehatan (health professional education unit) di Poltekes
- 3) Penguatan kapastitas dosen dan tenaga kependidikan

Pemberian rekomendasi dari Kemenkes untuk ijin pembukaan program studi



1. Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM PT) melalui :
 - a. Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
 - b. Pendampingan Pengembangan Standar Pendidikan
2. Manajemen Sertifikasi Dosen dan Beban Kerja Dosen
3. Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4. Pembinaan Implementasi Kurikulum dan Pengembangannya
5. Formulasi anggaran Poltekes terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi

Kerangka Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kesehatan Berbasis Data & TIK



MEMBANGUN SISTEM MELALUI JAGA MUTU



**Kerangka Integrasi Sistem
Pendidikan-Pelayanan**



**Konsep Integrasi Sistem Pendidikan –
Pelayanan dan Kerjasama Antar Profesi**



Hubungan Penjaminan Mutu
Sistem Pendidikan Kesehatan dan
Sistem Pelayanan Kesehatan



POLTEKKES MILIK KEMENKES

38 Poltekkes yang tersebar di 33 Provinsi :

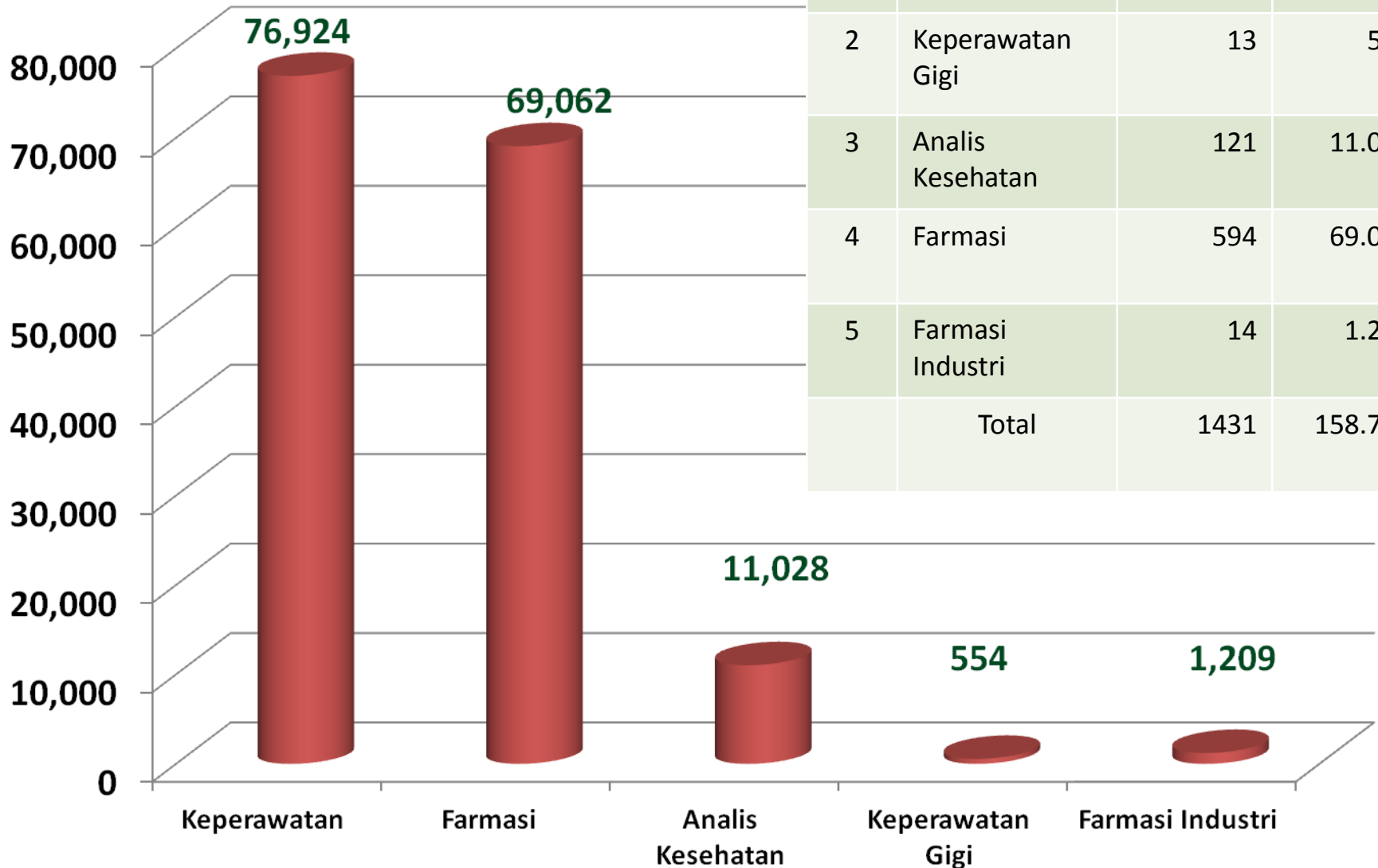
- ❑ 357 Program Studi
- ❑ 18 Jurusan (17 sudah terakreditasi)

➤ **Poltekkes Semarang sudah melaksanakan pendidikan S-2 Terapan dan sudah mendapatkan izin dari Kemendikbud**

- **Jumlah Dosen seluruhnya : 3.894**
 - Pendidikan S1/D4 : 843
 - Pendidikan S2 : 2.944
 - Pendidikan S3 : 107 (44 Dosen Tetap)
- Jumlah Dosen fungsional : 3.312
- Jumlah Dosen yg sudah tersertifikasi : 2.907
- Jumlah total mahasiswa : 68.288 mahasiswa

SMK Kesehatan

Sebanyak 1.431 sekolah, 158.777 siswa



NO.	PAKET KEAHLIAN	JUMLAH SMK	JUMLAH SISWA
1	Keperawatan	689	76.924
2	Keperawatan Gigi	13	554
3	Analis Kesehatan	121	11.028
4	Farmasi	594	69.062
5	Farmasi Industri	14	1.209
	Total	1431	158.777

Program Percepatan

Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Dari Pendidikan Menengah dan Diploma I Ke Diploma III

1. UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan mengatur kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan minimum Diploma III.
2. Memberikan masa peralihan selama 6 tahun bagi tenaga kesehatan untuk penyesuaian menjadi Diploma III.
3. Terdapat 146.542 PNS (bidan, perawat, tenaga gizi, kesehatan lingkungan, analis laboratorium, perawat gigi, teknisi farmasi dll) yang berpendidikan di bawah Dipoloma III, di RS, puskesmas dan fasyankes lainnya di 34 provinsi.

Dampak, Apabila dalam 6 th sejak tgl diundangkan belum memiliki kualifikasi minimal Diploma III maka

Bagi tenaga Kesehatan tersebut :

1. menjadi asisten tenaga kesehatan
2. tidak memiliki kewenangan melaksanakan praktik sebagai tenaga kesehatan
3. harus bekerja dibawah supervisi tenaga kesehatan

Bagi fasyankes tempat dia bekerja :

1. fungsi pelayanan kepada masyarakat akan terganggu karena tenaga kesehatannya tidak ada/kurang
2. fasyankes tidak lagi sesuai standar
3. kebutuhan formasi tenaga kesehatan akan melonjak

PETA JALAN PERCEPATAN PENDIDIKAN DIPLOMA III BAGI TENAGA KESEHATAN PNS

UU 36/2014
Tenaga
Kesehatan

Dalam masa peralihan 6 tahun seluruhnya harus sudah Diploma III

- Ps 8 pendidikan minimal Diploma III
- Ps 88, masa peralihan 6 thn

- 146.542 orang (bidan, erawat, ahli gizi, kesling, perawat gigi, analis lab dll)

Program reguler

Program Pendidikan
Jarak Jauh

- Program tugas belajar/beasiswa Kemenkes, Kemen Ristek & Dikti, K/L lain, Pemda, kerja sama dg swasta

- Program ijin belajar / mandiri

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Pengembangan program
oercepatan pendidikan

PT (Poltekes, STIKES, Fakultas) negeri dan swasta mendapat ijin menyelenggarakan program percepatan pendidikan

- Permen Ristek & Dikti
- Permen PAN & RB

Pengembangan
kurikulum &
metodologi Pendidikan
Jarak Jauh dg UT

Kegiatan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Identifikasi peserta & PT	selesai						
Penyusunan regulasi		Maret					
Penyusunan kurikulum & metode pembelajaran		Maret					
Program reguler		10.000	32.000	24.000	20.000		
Program Pendidikan Jarak Jauh		10.000	30.000	10.000	10.000		

LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN UPAYA PERCEPATAN PENDIDIKAN

NO	KEGIATAN	MITRA KERJA	JADUAL
1	Identifikasi jumlah PNS yang berpendidikan di bawah Diploma III	Dinkes Prov/Kab/Kota, RS Pemerintah & Swasta, TNI & POLRI	Desember 2014 - Januari 2015
2	Identifikasi PT kesehatan yang terakreditasi A dan B	Ditjen Dikti, PDPT	Desember 2014
3	Telaah dan melaporkan ke Ibu Menkes, mengirim surat kepada Men PAN & RB, Men Ristek & Dikti dan kepala BKN	Setjen	Desember 2014
4	Pembahasan awal dg Men PAN & RB, Men Ristek & Dikti dan kepala BKN → SKB	Men PAN & RB, Men Ristek & Dikti dan kepala BKN	Januari – Maret 2015
5	Pembahasan percepatan pendidikan dg Ditjen Dikti → Kepmen Ristek dan Dikti	Ditjen Dikti, OP,	Januari – Juni 2015
6	Pembahasan dg Universitas Terbuka dan penyusunan modul dll (program lain selain keperawatan dan kebidanan) → MOU	Ditjen Dikti, Universitas Terbuka, Poltekes	Januari – Juni 2015
7	Pengajuan ijin RPL dan ijin penyelenggaraan percepatan pendidikan	Seluruh Poltekes	Januari – Mei 2015
8	Pengembangan PJJ dg 2 USBJJ di Kupang dan Samarinda dan Pembukaan Prodi PJJ di Poltekes Jakarta	Poltekes dan Dinkes Provinsi sekitar	Januari – Juni 2015
9	Pengajuan anggaran untuk mendukung program percepatan pendidikan	BAPPENAS, Setjen, Ditjen Dikti	April – Juli 2015
10	Penerimaan mahasiswa Program Percepatan Pendidikan		
11	Launching program percepatan pendidikan		November 2015



TERIMA KASIH